



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
WILAYAH JAWA BARAT

ISSN-SNAB-2252-3936



PROCEEDINGS

**PROFESIONALISME AKUNTAN MENUJU
SUSTAINABLE BUSINESS PRACTICE**

KAMIS, 20 JULI 2017 | BANDUNG, JAWA BARAT

PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI AUDITOR INTERNAL TERHADAP KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT

Rikky Barkah¹, Aida Wijaya²

1. Universitas Widyatama
Jl. Cikutra No.204A Bandung
Email : rikkybarkah@gmail.com

2. Universitas Widyatama
Jl. Cikutra No.204A Bandung
Email : rafael.aida@widyatama.ac.id

ABSTRAK

Unit audit internal harus bebas dari pengaruh bagian-bagian yang ada di perusahaan dan kompetensi auditor internal yang memadai agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Fungsi audit internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh independensi dan kompetensi auditor internal terhadap kualitas hasil pemeriksaan inspektorat pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan kepustakaan yang diolah dengan uji korelasi. Hasil penelitian menunjukkan independensi auditor internal dan kompetensi auditor internal pada DPKAD Kota Bandung telah dilaksanakan dengan memadai dan memenuhi unsur-unsur teori audit internal, demikian pula dengan kualitas audit internal telah cukup memadai dan memenuhi unsur-unsur teori audit internal. Pengaruh independensi dan kompetensi auditor internal terhadap Kualitas hasil pemeriksaan inspektorat pada DPKAD Kota Bandung berdasarkan hasil uji korelasi memiliki hubungan yang sangat kuat dan berpengaruh signifikan.

Kata kunci: independensi, kompetensi, kualitas pelaksanaan audit internal.

1. PENDAHULUAN

Pengawasan intern yang dilakukan oleh Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan diluncurkan pada saat Konferensi Kedua AAIPI tanggal 13 Juni 2016, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia ini mengatur mengenai kegiatan audit intern yang dapat dilakukan oleh Auditor dan Pimpinan APIP sesuai dengan mandat serta kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing meliputi Audit terhadap Aspek Keuangan Tertentu, Audit Kinerja, Audit Dengan Tujuan Tertentu, Reviu, Evaluasi, Monitoring (Pemantauan), dan Kegiatan Pengawasan Lainnya, serta Pemberian Jasa Konsultansi (*consulting activities*). Standar Audit APIP sebagaimana diatur dalam PERMENPAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP dalam melaksanakan audit. Standar umum dalam standar audit tersebut antara lain mengatur tentang independensi APIP dan obyektifitas auditor. Disebutkan dalam standar umum tersebut bahwa: dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independen dan para auditornya harus obyektif dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini mengandung arti bahwa independensi APIP serta obyektifitas auditor diperlukan agar kredibilitas hasil pekerjaan APIP meningkat. (Adriyani, Andreas, Hardi, 2013).

Tidak mudah menjaga independensi auditor. Pengalaman kerja dan kompetensi yang melekat pada diri auditor bukan jaminan bahwa auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya. Suatu kerja sama dengan objek pemeriksaan yang terlalu lama dan berulang bisa menimbulkan kerawanan atas independensi yang dimiliki auditor. Belum lagi berbagai fasilitas yang disediakan objek pemeriksaan selama penugasan dapat mempengaruhi obyektifitas auditor, serta bukan tidak mungkin auditor menjadi tidak jujur dalam mengungkapkan fakta yang menunjukkan rendahnya integritas auditor. (Agusti dan Pertiwi, 2013). Fenomena yang terjadi di Kota Bandung adalah Pemerintah Kota Bandung hanya mendapat predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2013 dan 2014 dari BPK RI. Menurut Kepala Inspektorat Kota Bandung, Koswara "Masalah aset merupakan masalah vital yang kerap menjadi sandungan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Selain aset, lanjut Koswara, Pemkot Bandung pun disorot soal kelemahan pengendalian sistem internal penatausahaan piutang, pengendalian sistem internal sewa tanah dan bangunan, serta pengendalian sistem internal penatausahaan pertanggungjawaban hibah dan bansos". Menurut Koswara, aset selalu dikualifikasi BPK

sejak tahun 2007, hal tersebut mengakibatkan kualitas audit yang dilakukan oleh aparat Inspektorat menjadi perhatian masyarakat. Hal ini disebabkan dari temuan pemeriksaan audit tidak terdeteksi oleh aparat Inspektorat sebagai auditor internal. Akan tetapi ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal, ini menunjukkan bahwa kualitas audit aparat Inspektorat masih relatif kurang baik. (http://m.inilah.com/news/detail/1996050/diganjar-dwp-pemkot-bentuk_satgas-pembenahan-aset:2013). Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian dan pertimbangan penting audit inspektorat dan pimpinan fungsi pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah. Keinginan dan harapan tersebut dapat dicapai dengan cara, setiap pekerjaan audit yang dilakukan harus terkoordinasi dengan baik antara fungsi pengawasan dengan berbagai fungsi, aktivitas, kegiatan, ataupun program yang dijalankan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kualitas audit adalah dasar untuk memeriksa keberadaan bukti tujuan dari proses yang ada, menaksir seberapa berhasil proses yang telah dilakukan, menilai efektivitas pencapaian target, menyediakan bukti terkait pengurangan dan penghapusan beberapa permasalahan, serta alat pegangan manajemen untuk mencapai peningkatan secara terus menerus dalam organisasi (Bastian:2010).

Kompetensi audit diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seyogyanya tidak menggambarkan dirinya memiliki keandalan atau pengalaman yang tidak mereka punyai. Dalam semua penugasan dan dalam semua tanggung jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkat kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh Prinsip Etika (Mulyadi:2010).

Berdasarkan pemikiran di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut

1. Apakah kompetensi auditor internal berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
2. Apakah independensi auditor internal berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
3. Apakah kompetensi dan independensi auditor internal berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa tinjauan pustaka yang mendukung penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

2.1. Kompetensi Auditor Internal

Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2010:3) tentang standar kompetensi auditor adalah sebagai berikut:

“ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan/keahlian (skill) dan sikap (attitude) untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam jabatan fungsional auditor dengan hasil baik”.

Internal auditor dikatakan memiliki kemampuan profesional apabila dapat memberikan jaminan atau kepastian bahwa teknis dan latar belakang pendidikan para auditor internal tersebut telah sesuai dengan pemeriksaan yang akan dilaksanakan, juga haruslah memiliki atau mendapatkan pengetahuan, kecakapan dari berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab pemeriksaan. Internal auditor harus mencerminkan keahlian dan ketelitian profesional, seperti yang dikemukakan Tugiman (2007:27) adalah sebagai berikut:

“Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal dan setiap audit internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan dari berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas”.

Indikator kompetensi menurut Tugiman (1997:27) adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan audit internal harus menetapkan kriteria pendidikan dan pengalaman yang sesuai dalam mengisi jabatan-jabatan di bagian audit internal
2. Harus pula diperoleh kepastian yang pantas dan masuk akal tentang kualifikasi dan kemampuan setiap calon pemeriksa..

2.2. Independensi Auditor Internal

Menurut Tugiman (1997:20) audit internal haruslah memperoleh dukungan dari manajemen senior dan dewan, sehingga mereka akan mendapatkan kerja sama dari pihak yang diperiksa dan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara bebas dari berbagai campur tangan pihak lain.

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya, maka audit yang dihasilkan akan sesuai dengan fakta tanpa ada pengaruh dari luar. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka internal auditor tidak bertanggung jawab dalam fungsi eksekutif maupun operasi. Bagian ini harus mempunyai wewenang dalam mengkaji dan menilai setiap bagian dalam perusahaan sehingga dalam melakukan kegiatannya, internal auditor dapat bertindak objektif dan seefisien mungkin. Oleh karena itu, sebaiknya internal auditor tidak mempunyai wewenang langsung atas setiap bagian yang akan diaudit sehingga dapat mempertahankan independensinya dalam organisasi. Tugiman (1997:20) menyatakan bahwa:

“Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, hal mana sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektivitas para auditor internal”.

Tugiman menjelaskan bahwa audit internal harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang diperiksanya. Tugiman (1997:16) menjelaskan bahwa status organisasi dan objektivitas sebagai berikut.

1. Status organisasi
Status organisasi unit audit internal haruslah memberikan keleluasaan untuk memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan.
2. Objektivitas
Para pemeriksa internal atau auditor internal haruslah melakukan pemeriksaan secara objektif. Objektif adalah sikap mental bebas yang harus dimiliki oleh pemeriksa internal (internal auditor) dalam melaksanakan pemeriksaan.

2.3. Kualitas Audit

Menurut Arens & Loebbecke (2009:5) bahwa untuk memenuhi tujuan audit, auditor harus memperoleh bukti dengan kualitas dan jumlah yang mencukupi. Auditor harus menentukan jenis dan jumlah yang diperlukan serta mengevaluasi apakah informasi itu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Indikator kualitas audit menurut Tugiman (1997:18) yaitu:

1. Perencanaan pemeriksaan. Pemeriksa internal haruslah merencanakan setiap pemeriksaan
2. Pengujian dan pengevaluasian informasi. Pemeriksa internal harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan.
3. Penyampaian hasil pemeriksaan. Pemeriksa internal harus melaporkan hasil-hasil pemeriksaan yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaannya.
4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksa internal harus terus meninjau atau melakukan follow up untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindak lanjut yang tepat.

Sehingga berdasarkan ungkapan Tugiman di atas dapat terlihat bahwa auditor yang berkualitas akan selalu melakukan perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian informasi, penyampaian hasil pemeriksaan dan melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan paparan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Ho1: Independensi auditor internal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
 Ha1: Independensi auditor internal secara parsial berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan
 Ho2: Kompetensi auditor internal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
 Ha2: Kompetensi auditor internal secara parsial berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
 Ho3: Independensi dan kompetensi auditor internal secara simultan tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
 Ha3: Independensi dan kompetensi auditor internal secara simultan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, dimana menurut Arikunto (2013:338) analisis regresi berganda adalah suatu perluasan dari teknik regresi apabila terdapat lebih dari satu variabel bebas untuk

mengadakan prediksi terhadap variabel terikat. Dalam hal ini variabel bebas pertama adalah independensi auditor internal, variabel bebas kedua adalah kompetensi auditor internal, dan variabel terikatnya adalah kualitas pemeriksaan audit internal.

Model yang digunakan dalam analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

dimana :

- Y = variabel terikat (kualitas pemeriksaan).
- X1 = variabel bebas (independensi auditor internal).
- X2 = variabel bebas (kompetensi auditor internal).
- a = konstanta.
- b = koefisien regresi.
- e = error.

Selain itu juga dilakukan uji korelasi berganda untuk melihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Serta koefisien determinasi untuk melihat berapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Uji hipotesis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Uji Simultan (Uji F)
Uji F ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel-variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat).
- b) Uji Parsial (Uji t)
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel.

Analisis validitas dan reliabilitas yang dilakukan terhadap hasil jawaban kuesioner atas variabel bebas maupun variabel terikat menunjukkan bahwa item pertanyaan yang digunakan sudah valid dan reliabel.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui independensi dan kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan inspektorat secara simultan, sebagaimana dapat dilihat pada model persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0.137 + 0.561X_1 + 0.437X_2$$

Dari hasil persamaan regresi berganda tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan pengaruhnya terhadap kualitas hasil pemeriksaan inspektorat sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta bertanda negatif sebesar 0.137, yang menunjukkan apabila variabel independensi dan kompetensi tidak ada perubahan atau sama dengan 0 maka kualitas hasil pemeriksaan inspektorat meningkat sebesar 0.137%.
- b. Variabel independensi memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 0.561, hal ini berarti apabila nilai X_1 (independensi) meningkat sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel-variabel lain tetap, maka akan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan inspektorat sebesar 0.561%.
- c. Variabel kompetensi memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 0.437, hal ini berarti apabila nilai X_2 (kompetensi) meningkat sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel-variabel lain tetap, maka akan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan inspektorat sebesar 0.437%.

Hasil perhitungan koefisien korelasi (R) antara variabel independensi dengan kualitas internal audit diperoleh nilai r_s sebesar 0.914. Artinya independensi memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kualitas hasil pemeriksaan inspektorat yakni berada pada interval 0,80 – 0,899.

Hasil perhitungan koefisien korelasi (R) antara variabel kompetensi dengan kualitas internal audit diperoleh nilai r_s sebesar 0.839. Artinya kompetensi memiliki hubungan yang kuat dengan kualitas hasil pemeriksaan inspektorat yang berada pada interval 0,80 – 0,899.

Adapun hasil perhitungan koefisien korelasi (R) antara variabel independensi dan kompetensi internal auditor terhadap kualitas internal audit adalah sebesar 0.947. Hal ini menunjukkan keeratan hubungan termasuk kriteria kuat karena berada pada interval 0.800 – 1.000.

Perhitungan koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh atau kontribusi variabel independensi dan kompetensi terhadap kualitas pemeriksaan di inspektorat. Koefisien determinasi merupakan angka pengkuadratan dari koefisien korelasi. Besarnya pengaruh independensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan inspektorat sebesar 83.5% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain

Adapun untuk variabel kompetensi, besarnya pengaruh kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan inspektorat adalah sebesar 79% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Koefisien determinasi *multiple R*² = 0.897 = 89.7%, artinya kualitas hasil pemeriksaan inspektorat dipengaruhi oleh independensi dan kompetensi sebesar 89.7%, sedangkan sisanya dapat disebabkan oleh pengaruh faktor-faktor lain.

Adapun hasil uji atas hipotesis diperoleh sebagai berikut:

Hasil uji F:

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perbandingan F_{hitung} dengan F_{tabel} adalah H_0 ditolak karena $F_{hitung} 117.527 > F_{tabel} 3.3277$ serta hasil yang diperoleh dari perbandingan tingkat signifikansi adalah H_0 ditolak karena $F_{sig} 0,00 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independensi dan kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan inspektorat.

Hasil uji t:

Untuk variabel independensi terhadap variabel kualitas pemeriksaan, hasilnya adalah $t_{hitung} 11.392 > t_{tabel} 1.701$ yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang positif antara independensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan inspektorat.

Untuk variabel kompetensi terhadap variabel kualitas pemeriksaan, hasilnya adalah $t_{hitung} 10.263 > t_{tabel} 1.701$ yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh antara kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan inspektorat.

4.2 Pembahasan Penelitian

Tanggapan responden atas pertanyaan mengenai variabel independensi auditor dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Status auditor internal dalam organisasi dijabarkan dengan pertanyaan berikut:

- ✚ Penyusunan program audit bebas dari campur tangan pimpinan untuk menentukan, mengeliminasi atau memodifikasi bagian-bagian tertentu yang diperiksa
- ✚ Penyusunan program audit bebas dari intervensi pimpinan tentang prosedur yang dipilih auditor
- ✚ Penyusunan program audit bebas dari usaha-usaha pihak lain untuk menentukan subyek pekerjaan pemeriksaan

Hasilnya sebanyak 14.42% menyatakan sangat setuju, 62.82% menyatakan setuju, 11.54% menyatakan ragu-ragu, 9.62% menyatakan tidak setuju dan 1.60% menyatakan sangat tidak setuju.

Dengan demikian status organisasi di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung sudah memadai hal ini dilihat dari nilai rata-rata sebesar 3.47 yang berada pada interval 3.40 – 4.19

2. Obyektivitas auditor internal dijabarkan dengan pertanyaan berikut:

- ✚ Auditor memiliki pengetahuan dalam mengolah angka dan data tentang akuntansi
- ✚ Pemeriksaan bebas dari usaha-usaha manajerial (objek pemeriksaan) untuk menentukan atau menunjuk kegiatan yang diperiksa
- ✚ Pemeriksaan bebas dari kepentingan pribadi maupun pihak lain untuk membatasi segala kegiatan pemeriksaan

Hasilnya bahwa sebanyak 8.36% menyatakan sangat setuju, 65.55% menyatakan setuju, 11,04% menyatakan ragu-ragu 13.38% menyatakan tidak setuju dan 1.67% menyatakan sangat tidak setuju.

Dengan demikian obyektivitas pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung cukup memadai, hal ini dilihat dari nilai rata-rata sebesar 3.32 yang berada pada interval 2.60 – 3.39

Adapun rekapitulasi tanggapan responden mengenai independensi yang menyatakan sangat setuju 11.46%, menyatakan setuju 64.16%, menyatakan ragu-ragu sebesar 11.29%, tidak setuju 11.46% dan 1.64% menyatakan sangat tidak setuju serta memiliki nilai 3.39 yang berada pada interval 2.60-3.39. Dari hasil yang diperoleh ini dapat disimpulkan bahwa independensi auditor di DPKAD Kota Bandung telah dilaksanakan dengan cukup memadai.

Tanggapan atas kuesioner mengenai kompetensi internal auditor diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator pendidikan, diuraikan dalam pertanyaan berikut:

- ✚ Auditor menjunjung tinggi profesionalisme audit dengan berpikir luas, dan mampu menangani ketidakpastian
- ✚ Auditor memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan

Hasilnya diketahui bahwa sebanyak 8.06% menyatakan sangat setuju, 55.91% menyatakan setuju, 14.52% menyatakan ragu-ragu, 19.35% menyatakan tidak setuju dan 2.15% menyatakan sangat tidak setuju.

Dengan demikian variabel kompetensi untuk indikator pendidikan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dapat dikatakan cukup baik, dilihat dari nilai rata-rata sebesar 3.10 yang berada pada interval 2.60 – 3.39

2. Indikator Pengalaman, diuraikan dengan pertanyaan berikut:
 - ✚ Auditor memiliki pengalaman yang cukup untuk melakukan pemeriksaan
 - ✚ Auditor memiliki pengalaman bidang akuntansi

Berdasarkan hasil jawaban responden dapat diketahui bahwa sebanyak 16.59% menyatakan sangat setuju, 56.87% menyatakan setuju, 17.06% menyatakan ragu-ragu, 8.53% menyatakan tidak setuju dan 0.95% menyatakan sangat tidak setuju.

Dengan demikian kompetensi untuk indikator pengalaman di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dapat dikatakan baik, dilihat dari nilai rata-rata sebesar 3,52 yang berada pada interval 3.40 – 4.19.
3. Indikator kualifikasi dan kemampuan diuraikan ke dalam pertanyaan berikut:
 - ✚ Auditor harus memiliki keahlian untuk melakukan wawancara serta kemampuan membaca cepat
 - ✚ Auditor harus memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang akuntansi yang akan membantu dalam mengolah data.

Berdasarkan jawaban responden dapat diketahui bahwa sebanyak 24.89% menyatakan sangat setuju, 57.92% menyatakan setuju, 10.86% menyatakan ragu-ragu, 4.52% menyatakan tidak setuju dan 1.81% menyatakan sangat tidak setuju.

Dengan demikian variabel kompetensi untuk indikator kualifikasi dan kemampuan dapat dikatakan baik dilihat dari nilai rata-rata sebesar 3,68 yang berada pada interval 3.40 – 4.19
4. Indikator tindak lanjut hasil pemeriksaan diuraikan ke dalam pertanyaan berikut:
 - ✚ Hasil temuan auditor dilakukan evaluasi dan dipublikasikan secara transparan
 - ✚ Hasil temuan ditindaklanjuti sesuai dengan sepengetahuan manajerial

Berdasarkan jawaban responden dapat diketahui bahwa sebanyak 12.82% menyatakan sangat setuju, 61.54% menyatakan setuju, 9.23% menyatakan ragu-ragu, 13.33% menyatakan tidak setuju dan 3.08% menyatakan sangat tidak setuju.

Dengan demikian kompetensi untuk indikator tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat dikatakan baik dilihat dari nilai rata-rata sebesar 3,25 yang berada pada interval 2.60 – 3.39.

Rekapitulasi tanggapan responden mengenai kompetensi yang menyatakan sangat setuju 15.99%, menyatakan setuju 58.06%, menyatakan ragu-ragu sebesar 12.92%, tidak setuju 11.07% dan 1.97% menyatakan sangat tidak setuju serta memiliki nilai 3.39 yang berada pada interval 3.40 – 4.19. Dari analisis yang dilakukan ini dapat disimpulkan bahwa kompetensi auditor di DPKAD Kota Bandung cukup memadai.

Tanggapan atas kuesioner mengenai kualitas hasil pemeriksaan internal audit diuraikan sebagai berikut:

1. Kesesuaian Pemeriksaan dengan Standar Audit, diuraikan dalam pertanyaan berikut:
 - ✚ Saat menerima penugasan, auditor menetapkan sasaran, ruang lingkup, metodologi pemeriksaan
 - ✚ Dalam semua pekerjaan, saya harus direview oleh atasan secara berjenjang sebelum laporan hasil pemeriksaan dibuat
 - ✚ Proses pengumpulan dan pengujian bukti harus dilakukan dengan maksimal untuk mendukung kesimpulan, temuan audit, serta rekomendasi yang terkait
 - ✚ Auditor menatausahakan dokumen audit dalam bentuk kertas kerja audit dan disimpan dengan baik agar dapat secara efektif diambil, dirujuk, dan dianalisis
 - ✚ Dalam melaksanakan pemeriksaan, auditor harus mematuhi kode etik yang ditetapkan

Berdasarkan tanggapan responden dapat diketahui bahwa sebanyak 16,35% menyatakan sangat setuju, 75,73% menyatakan setuju, 5,16% menyatakan ragu-ragu, 1,72% menyatakan tidak setuju dan 1,03% menyatakan sangat tidak setuju.

Dengan demikian kualitas hasil pemeriksaan inspektorat untuk indikator pemeriksaan dengan standar audit dapat dikatakan baik dilihat dari nilai rata-rata sebesar 3.87 yang berada pada interval 3,40 – 4.19.
2. Kualitas Laporan Hasil Pelaksanaan Audit Internal, diuraikan dalam pertanyaan berikut:
 - ✚ Laporan hasil pemeriksaan memuat temuan dan simpulan hasil pemeriksaan secara objektif, serta rekomendasi yang konstruktif
 - ✚ Laporan mengungkapkan hal-hal yang merupakan masalah yang belum dapat diselesaikan sampai berakhirnya pemeriksaan
 - ✚ Laporan harus dapat mengemukakan pengakuan atas suatu prestasi keberhasilan atau suatu tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan objek pemeriksaan
 - ✚ Laporan harus mengemukakan penjelasan atau tanggapan pejabat/pihak objek pemeriksaan tentang hasil pemeriksaan
 - ✚ Laporan yang dihasilkan harus akurat, lengkap, objektif, meyakinkan, jelas, singkat, serta tepat waktu agar informasi yang diberikan bermanfaat secara maksimal

Berdasarkan jawaban responden dapat diketahui bahwa sebanyak 15,68% menyatakan sangat setuju, 72,47% menyatakan setuju, 9,41% menyatakan ragu-ragu, 1,39% menyatakan tidak setuju dan 1,05% menyatakan sangat tidak setuju.

Dengan demikian kualitas hasil pemeriksaan inspektorat untuk indikator kualitas laporan hasil pelaksanaan audit internal dapat dikatakan baik karena dilihat dari nilai rata-rata sebesar 3.83 yang berada pada interval 3,40 – 4.19.

Hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai kualitas hasil pemeriksaan internal inspektorat yang menyatakan sangat setuju 16,23%, menyatakan setuju 74,03%, menyatakan ragu-ragu sebesar 7,14%, tidak setuju 1,52% dan 1,08% menyatakan sangat tidak setuju serta memiliki nilai 3.85 yang berada pada interval 3.40-4.19. Dari analisis yang dilakukan ini dapat disimpulkan bahwa kualitas hasil pemeriksaan inspektorat di DPKAD Kota Bandung telah memadai dan memenuhi unsur-unsur teori audit internal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa independensi dan kompetensi internal auditor berpengaruh terhadap kualitas audit, sejalan dengan penelitian Astuti (2010) serta penelitian Tjun, Marpaung, dan Setiawan (2012). Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Adriani (2013).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kompetensi auditor internal berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
2. Independensi auditor internal berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Pemerintah Kota Bandung.
3. Kompetensi dan independensi auditor internal berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Pemerintah Kota Bandung.

Adapun saran yang dapat disampaikan berkenaan dengan hasil observasi selama penelitian adalah:

1. Dalam pelaporan hasil audit sebaiknya menggunakan bahasa yang umum dan mudah dimengerti agar memudahkan bagi objek yang diaudit.
2. Auditor selain harus berpikir luas, juga harus mampu menangani setiap permasalahan yang dihadapi tetapi harus membatasi rasa ingin tahunya hanya terbatas pada objek yang diauditnya secara profesional.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Annesa Adriyani, Andreas, Hardi, 2013 Pengaruh Keahlian, Independensi, Kecakapan Profesional, Tingkat Pendidikan Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Dengan Pengalaman Kerja Sebagai Variabel Moderating, *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* Vol. 6, Desember 2013, 10-18
- [2]. Ardani, Julian, 2015, *Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit*, Repository Universitas Widyatama
- [3]. Arens & Loebbecke, 2009, *Auditing*, Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta Salamba Empat
- [4]. Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed Revisi VI., Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta
- [5]. Astuti, Wati Aris, 2010, Pengaruh Independensi Dan Kompetensi Auditor Internal Terhadap Kualitas Pelaksanaan Audit Internal Pada Bumn Di Bandung, *Jurnal Ekono Insentif Kopwil4*, Volume 4 No. 2, Oktober 2010, ISSN: 1907 - 0640, halaman 1 s.d 10
- [6]. <http://m.inilah.com/news/detail/1996050/diganjar-dwp-pemkot-bentuk-satgas-pembenahan-aset:2013>
- [7]. Restu Agusti dan Nastia Putri Pertiwi, 2013, Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Se Sumatera).
- [8]. Tugiman, Hiro, 1997, *Standar Profesional Audit Internal*, Yogyakarta, Kanisius